

PROSPEK PENDIRIAN BPR DI KOTA JAMBI*)

Oleh: Dr. Muhammad Safri,SE,M.Si

Slamet Rakhmadi,SE, M.Si

ABSTRAK

Keberadaan BPR di Kota Jambi sebagai pengganti ketidak mampuan bank-bank umum dalam menjangkau UMKM yang cukup tersebar keberadaannya sebagai akibat keterbatasan biaya operasional yang dimiliki, ketiadaan tenaga secara khusus yang memiliki kemampuan memahami karakteristik UMKM yang pada umumnya belum bankable dan hanya sebagian yang feasible dalam hal kriteria perbankan. Keterbatasan tersebut semakin mendorong perlu adanya pengembangan lembaga keuangan mikro dalam bentuk BPR di Kota Jambi dan keberadaannya dirasa memiliki prospek yang cukup baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Prospek keberadaan BPR di Kota Jambi dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

- 1. Aspek pemasaran yang meliputi : pemasaran produk (kredit) dan kekuatan pesaing.*
- 2. Aspek manajemen yang meliputi : sumberdaya manusia dan pengalaman yang dimiliki serta pertimbangan lainnya.*
- 3. Aspek sosial ekonomi yang meliputi : tersedianya sarana dan prasarana, meningkatnya pendapatan masyarakat dan membuka kesempatan kerja.*
- 4. Aspek keuangan/finansial yang meliputi : Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), waktu pengembalian (Payback period) dan Break Even Point (BEP).*

Berdasarkan hasil temuan dalam studi kelayakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi dilihat dari : aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek finansial dan persepsi masyarakat (UMKM) diperoleh hasil bahwa BPR layak (feasible) untuk didirikan dan sebaiknya di kelola/didirikan oleh pemerintah Kota Jambi. Keberhasilan mendirikan BPR di Kota Jambi akan memberi peluang tersedianya dana bagi pengembangan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum atau UMKM khususnya. Pengembangan aktivitas ekonomi diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian Kota Jambi, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum maupun UMKM khususnya

Kata Kunci : BPR,UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Begitu besarnya peran UMKM dalam pembangunan mengharuskan pemerintah memberi perhatian lebih atas perkembangannya, terutama penyediaan modal usaha dan ini dapat dilakukan melalui peran dari lembaga keuangan, baik milik pemerintah maupun swasta. Keberadaan lembaga keuangan yang ada saat ini dirasa belum bisa memenuhi kebutuhan dan pengembangan UMKM, karena UMKM memiliki hambatan yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), lemahnya manajemen usaha, rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan dan pasar, serta rendahnya informasi dan teknologi yang dimilikinya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dapat teratasi dengan keberadaan lembaga keuangan mikro. Bentuk lembaga keuangan mikro yang dirasa mampu mengatasi hambatan yang dihadapi UMKM adalah dalam bentuk Bank Perkereditan Rakyat (BPR). Keberadaan BPR di Kota Jambi dirasa sangat mendesak, hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kota Jambi. Jumlah UMKM di Kota Jambi pada tahun 2009 berjumlah 10.112 unit dan meningkat menjadi 12.230 unit di tahun 2011 atau meningkat 20,95 persen.

Jumlah UMKM tersebut merupakan jumlah terbesar di banding jumlah UMKM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi. Jumlah UMKM di Provinsi Jambi pada tahun 2009 adalah 19.155 unit dan pada tahun 2011 berjumlah 20.375 unit. (Statistik Indonesia).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

BPR di Kota Jambi dan keberadaannya dirasa memiliki prospek yang cukup baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Prospek keberadaan BPR di Kota Jambi dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek pemasaran yang meliputi : pemasaran produk (kredit) dan kekuatan pesaing.
2. Aspek manajemen yang meliputi : sumberdaya manusia dan pengalaman yang dimiliki serta pertimbangan lainnya.
3. Aspek sosial ekonomi yang meliputi : tersedianya sarana dan prasarana, meningkatnya pendapatan masyarakat dan membuka kesempatan kerja.
4. Aspek keuangan/finansial yang meliputi : *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, waktu pengembalian (*Payback period*) dan *Break Even Point (BEP)*.

2. Tinjauan Pustaka

Bank dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya Kasmir (2001) menjelaskan, bahwa bank adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Bank yang beroperasi di Indonesia jika dilihat dari jenisnya berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dapat dibagi menurut fungsinya yaitu : bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR/Akyuwen dkk, 2010). Sementara, berdasarkan sisi kepemilikannya dapat dibagi atas : bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran. Zulverdi dkk (2006) menjelaskan dalam membiayai kegiatan operasional bank di biayai dari : dana dari bank itu sendiri,

dana yang bersumber dari masyarakat, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Pendapatan lembaga keuangan bank menurut Muljono (1995) digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan operasional berupa : pendapatan operasional dan pendapatan non operasional

Sebagai lembaga keuangan, pengawasan kesehatan lembaga keuangan di Indonesia menurut Bank Indonesia (BI) dapat dinilai dengan menggunakan kriteria CAMEL (*capital, asset, management, earning liquidity*). BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*).

Dalam pendirian BPR, besarnya modal pendirian ditentukan sebagai berikut : modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar : Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bekasi dan Karawang, Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibu kota propinsi diluar wilayah tersebut diatas dan Rp. 500.000.000 (lim ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah ibukota Jakarta, kabupten/kota tanggerang, beklasi dan kerawang serta ibu kota propinsi. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian serta bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).

3.METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan analisis prospek pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi menggunakan data sekunder berbentuk *time series* tentang aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan persepsi masyarakat terutama UMKM di Kota Jambi. Data sekunder diperoleh dari instansi teknis yang ada di Kota Jambi maupun diluar Kota Jambi dan bersumber dari kepustakaan yang terkait dengan kegiatan analisis. Serta data primer yaitu data persepsi yang diperoleh langsung dari responden yaitu UMKM dalam bentuk kuesioner.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode penelitian status objek yang diamati dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi objek yang diteliti tersebut berdasarkan data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh suatu lembaga. (Sevilla dkk, 1993) serta metode analisis kuantitatif (Mahrinasari, 2003) yaitu : metode *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* dan *Break Even Point* (BEP).

4. PEMBAHASAN

Pengkajian atau penilaian investasi yang dilakukan, terutama oleh pemerintah perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah investasi memiliki prospek yang menguntungkan saat sekarang maupun dimasa datang serta memiliki resiko kerugian yang kecil. Aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Jambi dapat dilihat dari aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek finansial/keuangan.

PROSPEK ASPEK PEMASARAN

Pelaksanaan kegiatan investasi pendirian BPR di Kota Jambi dari aspek pemasaran terlihat dari prospek pemasaran produk sangat mendukung. Hal ini dilihat dari kondisi : Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan serta perekonomian Provinsi Jambi, kondisi ini dapat mempermudah mempromosikan keberadaan BPR, menawarkan produk yang di hasilkan dan mudah di jangkau serta menjangkau para nasabah, diharapkan mampu menekan biaya operasional seminimal mungkin serta menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada para nasabah sebesar mungkin, dalam menawarkan produk yang di hasilkan

BPR Kota Jambi menghadapi pasar yang bersifat *Perfect Competition* artinya menghadapi pasar bersifat bersaing, walaupun produk yang dihasilkan/ditawarkan sama dengan lembaga keuangan lainnya, peningkatan jumlah nasabah yang dicerminkan dari besarnya jumlah penduduk yang cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,94 persen, peningkatan jumlah UMKM yang mengalami peningkatan sebesar 28,26 persen dan kemampuan menekan laju tingkat inflasi.

Aspek jumlah pesaing yaitu keberadaan BPR dan bank umum di Kota Jambi juga mendukung berdirinya BPR di Kota Jambi, hal ini dapat dilihat dari

jumlah BPR dan bank-bank umum di Provinsi Jambi belumlah terlampau banyak. Jumlah BPR di Provinsi Jambi selama tahun tersebut meningkat sebesar 26,65 persen atau dari 5 pada tahun 2008 meningkat menjadi 12 di tahun 2011 dan jumlah bank yang ada berjumlah 18 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 27 pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 27,40 persen.

PROSPEK ASPEK MANAJEMEN

Kegiatan investasi pada suatu kegiatan tidak terlepas dari aspek manajemen. Aspek manajemen yang perlu diperhatikan tersebut meliputi : *planing, organising, actuating dan controlling* (POAC). Keberhasilan menjalankan ke empat komponen utama manajemen akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan. Pelaksanaan ke empat komponen di atas sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, baik dari pendidikan, pengalaman, *skill* dan menguasai teknologi. Melihat kondisi sumberdaya manusia yang ada di Kota Jambi,

syarat tersebut sangatlah mendukung. Sumberdaya manusia di Kota Jambi tidaklah kalah dengan sumberdaya manusia di Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Jambi. Berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh penduduk Kota Jambi selama tahun 2008-2011 memperlihatkan kecenderungan yang semakin membaik. Penduduk Kota Jambi masuk dalam katagori usia produktif

PROSPEK ASPEK SOSIAL EKONOMI

Pendirian BPR di Kota Jambi berdasarkan aspek sosial ekonomi sangat mendukung, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya pendapatan perkapita

dan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada Selama tahun 2008-2011, jumlah penduduk miskinnya turun sebesar 5,61 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin ini sebagai akibat pengaruh semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Kota Jambi yang meningkat sebesar 2,93 persen

Kondisi ini menggambarkan semakin membaiknya daya beli masyarakat dan pada akhirnya mampu mendorong peningkatan output dunia usaha. Indikator ini dapat dijadikan cara untuk mempercepat keberadaan BPR serta mendorong pertumbuhan aset BPR itu sendiri, menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada nasabah, meminimalisir terjadinya *Non Performing Loan (NPL)* serta menjamin kecukupan dana BPR. Penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat tersebut sebagai akibat dari meningkatnya PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,70 persen dan atas dasar harga berlaku naik rata-rata sebesar 10,55 persen.

PROSPEK ASPEK KEUANGAN/FINANSIAL

Berdasarkan hasil perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* dan *Break Even Point* (BEP) pada investasi BPR di Kota Jambi diperoleh hasil sebagai berikut : perhitungan NPV (*Net Present Value*) pada kondisi diskon faktor (*discount factor*) 15 %, maka diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 345.550.355,9 dan nilai NPV > 0, artinya pada tingkat diskon faktor 15 %, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) layak (*feasible*) untuk didirikan di Kota Jambi, perhitungan IRR (*Internal Rate of Return*) memperlihatkan nilai IRR = 22,17 % lebih besar dari nilai SOCC (*Social Opportunity Cost of Capital*) sebesar 15 %, artinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) layak (*feasible*) didirikan di Kota Jambi, jangka waktu pengembalian (*Pay Back Period*) investasi pendirian BPR membutuhkan waktu selama 4,168 (4 tahun 2 bulan) dan kondisi *Break Even Point* (BEP) tercapai pada tahun ke 2,79 atau 2 tahun 8 bulan.

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

kenapa UMKM menjadi sasaran utama dalam pengambilan persepsi, karena jumlahnya cukup banyak di Kota Jambi yaitu berjumlah 10.549 UMKM di tahun 2011 dan sisanya tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Alasan selanjutnya,

karena UMKM memiliki modal/kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 milyar, Adapun pertanyaan yang diajukan meliputi 3 Aspek yakni :

- 1. Kondisi sosial dan ekonomi**
- 2. Persepsi tentang Bank Umum**
- 3. Persepsi tentang BPR**

5. KESIMPULAN/PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dalam studi kelayakan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi dilihat dari : aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek finansial dan persepsi masyarakat (UMKM) diperoleh hasil bahwa BPR layak (*feasible*) untuk didirikan dan sebaiknya di kelola/didirikan oleh pemerintah Kota Jambi. Keberhasilan mendirikan BPR di Kota Jambi akan memberi peluang tersedianya dana bagi pengembangan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum atau UMKM khususnya. Pengembangan aktivitas ekonomi diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian Kota Jambi, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum maupun UMKM khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen. Roberto, Wijaya. Krisna dan Suthapa. I Dewa Gde, 2010, Teori Dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Kasmir, 2001, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta.
- Mahrinasari, 2003, Pengelolaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandarlampung, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta.
- Sevilla. G, Consuelo, Achave. A, Jesus, Punsalan. G, Twila, Regala. P, Bella Dan Uriarte. G, Gabriel, 1993, Pengantar Metode Penelitian, UI- PRESS, Jakarta.
- Soetrisno, Noer (2003), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah, Forum Diskusi Ekonomi Putaran III tahun 2003, UPN Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Zulvendri, Doddy, Gunadi, Imam dan Pramono, 2006, Bank Portofolio Model And Monetary Policy In Indonesia, Bank Indonesia. Jakarta